

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen secara berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarga serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial itu sendiri merupakan inti etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya (Wati, 2019).

Pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk nyata keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih aktif dalam mengambil tindakan dalam hal tanggung jawab sosial. Pemikiran ini didasarkan pada manfaat yang ditimbulkan dalam jangka panjang oleh perusahaan terhadap semua pihak, yang dalam hal ini dikhususkan pada perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tanggung jawab sosial diantaranya adalah (Radyati, 2014) :

a. Manfaat bagi perusahaan

Manfaat yang jelas terhadap perusahaan apabila perusahaan itu menjalankan tanggung jawab sosialnya adalah meningkatnya citra perusahaan di mata masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa perusahaan akan membantu

perekonomian masyarakat, dan senantiasa dianggap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat lain yang akan didapatkan oleh perusahaan antara lain: memperkuat brand perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan, serta meningkatkan harga saham

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri, manfaat yang diperoleh adalah mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya dipahami sebagai hubungan antara penjual dan pembeli saja. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun lingkungan masyarakat yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan dan lain-lain.

c. Manfaat Bagi Pemerintah

Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, pemerintah tidak hanya berfungsi untuk menetapkan aturan dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak pelanggar.

Dari manfaat jangka panjang yang ditimbulkan oleh pengungkapan tanggung jawab sosial, luas pengungkapan itu sendiri dapat dinilai melalui item-item yang kemudian akan diberikan skor dan akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI *guidelines*. Indikator kinerja itu dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu (Wati, 2019).

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kondisi ekonomi dari *stakeholder* dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan :

a. Arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan

b. Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat kinerja keuangan merupakan hal yang mendasar untuk memahami organisasi dan berkelanjutannya. Akan tetapi, informasi ini biasanya sudah dilaporkan dalam laporan keuangan

## 2. Lingkungan

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kehidupan, di dalam system ala, termasuk di dalamnya sebuah ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energy, air) dan output (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah yang dapat merusak ekosistem lingkungan serta dampak dari produk dan jasa yang dihasilkan

## 3. Sosial

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi yang telah berdampak didalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan/tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk.

Dari manfaat jangka panjang yang ditimbulkan serta melalui indikator kinerja diatas, total indikator kinerja seluruhnya mencapai 91 indikator. Berikut ini adalah indikator-indikator dari dimensi pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI-G4 :

**Tabel 2.1 Kategori Pengungkapan berdasarkan GRI-G4:**

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
KATEGORI EKONOMI		
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan

Lanjutan Tabel 2.1

KATEGORI EKONOMI		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan Kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total limbah bedasarkan jenis dan metode Pembuangan.
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan.

Lanjutan Tabel 2.1

KATEGORI LINGKUNGAN		
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diespor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang Diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGA KERJA DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut jender
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian Bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi

Lanjutan Tabel 2.1

<b>KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGA KERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b>	
	terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan.
	LA10 Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11 Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan.
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
<b>SUB KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA</b>	
Investasi	HR1 Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih.
Non-diskriminasi	HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4 Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
pekerja anak	HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

Lanjutan Tabel 2.1

Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Hak Adat	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan
Praktik Pengamanan	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
Asesmen	HR9	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI: MASYARAKAT</b>		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang Diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang Diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Ma	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB-KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK</b>		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan

Lanjutan Tabel 2.1

SUB-KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK		
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil.
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data Pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI). Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam sustainability reporting, *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) diungkapkan dengan menggunakan indikator GRI (Wati, 2019).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menggambarkan baik buruknya suatu perusahaan dimata investor, kreditor, maupun masyarakat berdasarkan kinerja atau pencapaian perusahaan mulai dari perusahaan tersebut didirikan. Perusahaan yang menyalurkan dana tanggung jawab sosial dianggap mempunyai prospek yang baik terhadap citra perusahaan. Model pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut (Wati, 2019) :

$$CSRDI_j = \sum \frac{X_{ij}}{n_j} \quad (2.1)$$

Keterangan :

*CSRDI<sub>j</sub>* = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan j.

*X<sub>ij</sub>* = Jumlah item yang diungkapkan.

$n_j$  = Jumlah item pengungkapan tanggung jawab sosial untuk perusahaan j.

### 2.1.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut (Kasmir, 2018).

Berikut adalah tujuan rasio profitabilitas secara umum, antara lain (Kasmir, 2018) :

- a. Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan
- b. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- c. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- d. Mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman ataupun modal sendiri.

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) adalah rasio keuangan yang menunjukkan laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas. *Return on Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2018).

*Return on Equity* (ROE) itu sendiri dapat ditentukan dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik bagi pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam

perusahaan. *Return on Equity* (ROE) lebih memeperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Return on Equity menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha (Darmawan, 2020).

ROE berfungsi untuk menilai suatu korporasi dalam memperoleh profit yang didapat dari investasi para *stakeholders*. ROE yang tinggi berimbas menaikkan *stock price*. Apabila *stock price* naik maka penawaran akan menjadi tinggi, sehingga investor akan bertahan dan senang dengan prospek perusahaan karena mereka percaya dengan rentabilitas atau modal perusahaan yang bagus. Hal ini yang memicu nilai perusahaan menjadi semakin naik, begitupun sebaliknya. Keterbatasan dalam penggunaan ROE adalah besarnya peluang ROE untuk menjadi tidak relevan jika digunakan untuk membandingkan beberapa perusahaan pada industry dan sektor yang berbeda-beda. Beberapa sektor industry memerlukan modal atau ekuitas yang besar dibandingkan perusahaan pada sektor industry dan sektor usaha lainnya, sehingga mengakibatkan ROE yang didapat cenderung lebih rendah. Selain itu, ROE juga memiliki risiko untuk dimanipulasi. Kualitas ROE tergantung kepada kualitas laba yang diperoleh. (Arum, et al., 2020).

ROE bertujuan untuk menghitung tingkat keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya, akan semakin bagus dan menarik pula bagi pihak investor untuk menanamkan modalnya di dalam perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan memberikan keyakinan kepada kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut (Kasmir, 2018).

ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2018) :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \quad (2.2)$$

### 2.1.3 Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya, apabila

perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih (Kasmir, 2018).

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. *Current Ratio* (CR) dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan (Kasmir, 2018).

*Current Ratio* (CR) atau rasio lancar merupakan kesiapan yang menggambarkan tingkat kelancaran kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka pendeknya. *Current Ratio* (CR) dikembangkan untuk mengetahui lebih dalam tentang pelunasan utang jangka pendek, peroleh laba kembali usaha. Semakin tinggi tingkat rasio maka semakin baik karena perusahaan mampu dalam membayarkan utang jatuh temponya (Sirait, 2016).

*Current Ratio* (CR) menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rasionalnya dihitung dengan membagi nilai aset lancar dengan utang lancar. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan dan digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. *Current ratio* (CR) harus dianalisis selama periode waktu tertentu. Peningkatan *current ratio* selama periode waktu dapat menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan atau pendekatan yang lebih konservatif terhadap manajemen modal kerja (Darmawan, 2020).

Semakin tinggi nilai *Current ratio* (CR) mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka

pendeknya. Meskipun *Current Ratio* (CR) menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi, namun perlu diingat bahwa jika current ratio (CR) terlalu tinggi akan mengurangi kemampuan untuk memperoleh laba perusahaan karena dana kas banyak yang tidak berputar. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan jangka pendek yang kuat apabila, mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya, mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasional perusahaan yang normal, mampu membayar bunga utang jangka pendek dan dividen, dan mampu memelihara kredit rating yang menguntungkan (Arum, et al., 2020).

Dari hasil pengukuran rasio, apabila current ratio (CR) rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa *Current Ratio* (CR) dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dengan hasil rasio tersebut, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek (Kasmir, 2018).

Untuk pihak-pihak luar perusahaan seperti pihak kreditor, investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* (CR) bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Kemampuan membayar inilah yang akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar akan mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Dalam artian, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu (Kasmir, 2018).

Likuiditas yang diprosikan dengan *Current Ratio* (CR) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2018) :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.3).$$

#### 2.1.4 *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas atau dengan kata lain besar beban liabilitas

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, jika perusahaan tersebut dibubarkan (likuidasi) (Kasmir, 2018).

Berdasarkan teori *stakeholder*, ketika perusahaan memiliki jumlah liabilitas yang besar, risiko kredit macet meningkat, sehingga kreditur memantau secara ketat aktivitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman dari peminjam untuk mendanai asetnya. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan akan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Tingginya tingkat leverage yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan sejauh ini mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena kewajiban perusahaan berasal dari kreditnya. Seiring dengan meningkatnya leverage, demikian pula intensitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkat (Fahmi, 2020).

Pada penelitian ini leverage diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan pengukuran rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai dari hutang (Kasmir, 2018).

DER secara langsung mempengaruhi risiko keuangan suatu organisasi. Ketika rasio utang terhadap ekuitas tinggi, maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan *default* dan dilikuidasi. DER untuk setiap perusahaan berbeda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil (Darmawan, 2020).

DER tergolong ukuran yang signifikan tentang leverage karena tingginya tingkat hutang dalam struktur modal dapat mempersulit perusahaan dalam memenuhi pembayaran beban bunga dan pelunasan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Lebih jauh, dengan posisi hutang yang tinggi dapat menimbulkan risiko terkurasnya

kas sampai pada kondisi buruk. Demikian pula hutang yang berlebihan akan menyebabkan berkurangnya fleksibilitas keuangan karena perusahaan akan mengalami kesulitan memperoleh dana selama pasar uang ketat. DER sebagai bentuk usaha yang dilakukan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Apabila perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya maka perusahaan tersebut akan semakin baik dan mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditor sehingga ketika perusahaan memerlukan dana lagi untuk menjalankan usahanya, perusahaan akan mudah mendapatkan pinjaman dari pihak kreditor (Kasmir, 2018).

DER dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2018) :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Equity}} \quad (2.4)$$

### 2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan dan rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan resiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil, dengan berbagai cara, antara lain total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi (Wati, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut merupakan definisi serta karakteristik dari berbagai usaha dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Presiden Republik Indonesia, 2021).

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan usaha mikro paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ukuran perusahaan juga menunjukkan adanya perbedaan resiko usaha antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan sehingga akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar

menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar pula sehingga akan semakin meningkatkan laba perusahaan (Wati, 2019).

Perusahaan yang lebih besar memiliki kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam kegiatan operasinya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan dengan lebih banyak aset likuid diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan. Besar kecilnya suatu perusahaan mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapinya. Perusahaan besar memiliki tingkat rasio yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Ini karena perusahaan besar dapat mengontrol kondisi pasar dengan lebih baik dan dengan demikian mampu menghadapi persaingan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga akan semakin baik (Ulhaq, 2021).

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Wati, 2019) :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset}) \quad (2.5)$$

### 2.1.6 Agresivitas Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu negara dan kemakmuran rakyat (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021).

Agresivitas pajak adalah istilah yang diberikan untuk tindakan agresif terkait kebijakan perpajakan di perusahaan. Agresivitas pajak sendiri adalah tindakan yang didesain untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak

yang sesuai dimana diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Semua tindakan yang dilakukan berawal dari aturan yang bercelah sehingga ada kemungkinan menimbulkan berbagai pandangan mengenai aturan tersebut. (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021).

Dalam melakukan tindakan agresif pajak, terdapat beberapa keuntungan diantaranya sebagai berikut (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021):

1. Penghematan pajak, sehingga bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan oleh manajer tersebut
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusutan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berlawanan dengan keuntungan, terdapat juga kerugian dari tindakan pajak yang agresif, antara lain (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021):

1. Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit
2. Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan
3. Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak yang agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri. Hal ini diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri setelah memenuhi persyaratan, antara lain (Presiden Republik Indonesia, 2013) :

1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatta untuk diperdagangkan di bursa efek indonesia
2. Saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak

3. Masing-masing kepemilikan oleh tiap-tiap pihak harus lebih kecil dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh
4. Ketentuan untuk no 1,2, dan 3 harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu pembayaran pajak secara tunai atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Metode perhitungan pada ETR memperkirakan dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran sebelum laba pajak atau arus kas. ETR adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui perencanaan pajak dengan strategi yang sesuai (legal) berdasarkan peraturan perpajakan seperti penghindaran pajak dan penghematan pajak atau dengan strategi yang tidak sesuai (ilegal) peraturan perpajakan seperti penyelundupan pajak. Agresivitas pajak sendiri dianggap sebagai pengurang penghasilan perusahaan dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan penghasilan dan meminimalkan pengeluaran (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021).

ETR pada perusahaan bersifat relatif karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan. Tarif pajak yang efektif dapat berbeda ketika perusahaan aktif diluar daerah dimana mereka berdomisi. Tarif pajak efektif menjadi campuran dari tarif pajak yang berbeda dari negara-negara dimana kegiatan tersebut terjadi sehubungan dengan laba yang dihasilkan disetiap negara. Jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi disuatu negara dengan tingkat pajak yang tinggi dan laba yang rendah disuatu negara dengan tingkat pajak yang rendah, tarif pajak efektif akan menjadi rata-rata dan lebih tinggi dari pajak rata-rata sederhana dari kedua negara (Suandy & Erly, 2016).

ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.6)$$

### 2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusi juga memberikan keuntungan yang lebih besar, karena dengan kepemilikan yang lebih besar sehingga mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional lebih baik dibandingkan kepemilikan individu karena institusi memiliki posisi yang lebih baik dari individu sehingga mampu melakukan pengambilalihan perusahaan yang tidak efisien dan ancaman ini bisa memaksa manajer agar lebih efisien (Gunawan, 2016).

Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen, sedangkan investor aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tidak jarang kegiatan ini mampu meningkatkan harga saham sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (Gunawan, 2016).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Gunawan, 2016).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti, kepemilikan institusional dapat mendorong

perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial (Gunawan, 2016).

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Adapun rumus kepemilikan institusional yaitu (Gunawan, 2016) :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \quad (2.7)$$

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. Fera Susilowati, Khusnatul Zulfa, dan Arif Hartono (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Tipe Industri, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Sektor Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016 dengan total sampel sebanyak 21 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Sedangkan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industry, dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Tipe Industri, dan Dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Untuk hasil penelitian secara parsial Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. *Leverage* dan tipe Industri berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Susilowati, Zulfa, & Hartono, 2018).
2. Kristina Apriliani Putri, Elma Muncar Aditya, dan Nurdhiana (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 dengan total sampel sebanyak 27 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sedangkan Likuiditas dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Putri, Aditya, & Nurdhiana, 2019).

3. Ida Ayu Putri Laksmidewi Purba dan Made Reina Candradewi (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 dengan total sampel sebanyak 26 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu *Leverage*, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *leverage*, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *Leverage*, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (Candradewi, 2019).
4. Intan Mahalistian dan Willy Sri Yuliandhari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan *Slack Resources* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019 dengan total sampel sebanyak 81 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu Profitabilitas, Agresivitas Pajak dan *Slack Resources*. Hasil penelitian secara simultan

menunjukkan bahwa profitabilitas, agresivitas pajak, serta *slack resources* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan Agresivitas Pajak dan *Sluck Resources* tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Yuliandhari & Mahalistian, 2021).

5. Patrisia Adiputri Singal dan I Nym Wijana Asmara Putra (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 dengan total sampel sebanyak 40 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Kepemilikan Asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Singal & Putra, 2019).

6. Ni Putu Tista Paradiva Yani dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 dengan total sampel sebanyak 51 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan *leverage* berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Paradiva & Suputra, 2020).

7. Ni Wayan Ristiari Jananti dan Putu Ery Setiawan (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Agresivitas Pajak Pada *Corporate Social Responsibility* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian dilakukan pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 dengan total sampel sebanyak 20 perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel independennya yaitu Agresivitas Pajak. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agresivitas Pajak berpengaruh pada *Corporate Social Responsibility*. Dan Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh agresivitas pajak pada *Corporate Social Responsibility* (Setiawan & Jananti, 2018).
8. Niki Ratnaari dan Iren Meita melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2015. Dengan total sampel sebanyak 22 perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan variabel independennya adalah karakteristik perusahaan. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Ratnasari & Meita, 2017)

**Tabel 2.2 Review Peneliti Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang di peroleh
Fera Susilowati, Khusnatul Zulfa, dan Arif Hartono	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tipe i	Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Secara Simultan : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tipe Industri, dan Dewan

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang di peroleh
(2018)	industry, dan ukuran dewan komisaris terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	<u>Variabel Independen :</u> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Tipe Industri, Ukuran Dewan Komisaris.	komisaris secara simultan berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> .  <u>Secara Parsial :</u> 1. <i>Tipe</i> Industri, Ukuran Dewan Komisaris, dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social responsibility</i> . 2. Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
Ida Ayu Putri Laksmidewi Purba dan Made Reina Candradewi (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Pengungkapan Corporate Social Responsibility</i>  <u>Variabel Independen :</u> <i>Leverage</i> , Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan :</u> Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa <i>leverage</i> , likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i>  <u>Secara Parsial :</u> <i>Leverage</i> , Likuiditas, Profitabiliitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i> .
Intan Mahalistian dan Willy Yuliandhari (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan <i>Stuck Resources</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social responsibility</i>	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Pengungkapan Corporate Social Responsibility</i>  <u>Variabel Independen :</u> Profitabilitas, Agresivitas Pajak, dan <i>sluck resources</i>	<u>Secara Simultan :</u> Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, agresivitas pajak, serta <i>slack resources</i> berpengaruh secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial  <u>Secara Parsial :</u> 1. Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> 2. Agresivitas dan <i>slack resources</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>corporate social responsibility</i> .

Lanjutan Tabel 2.2

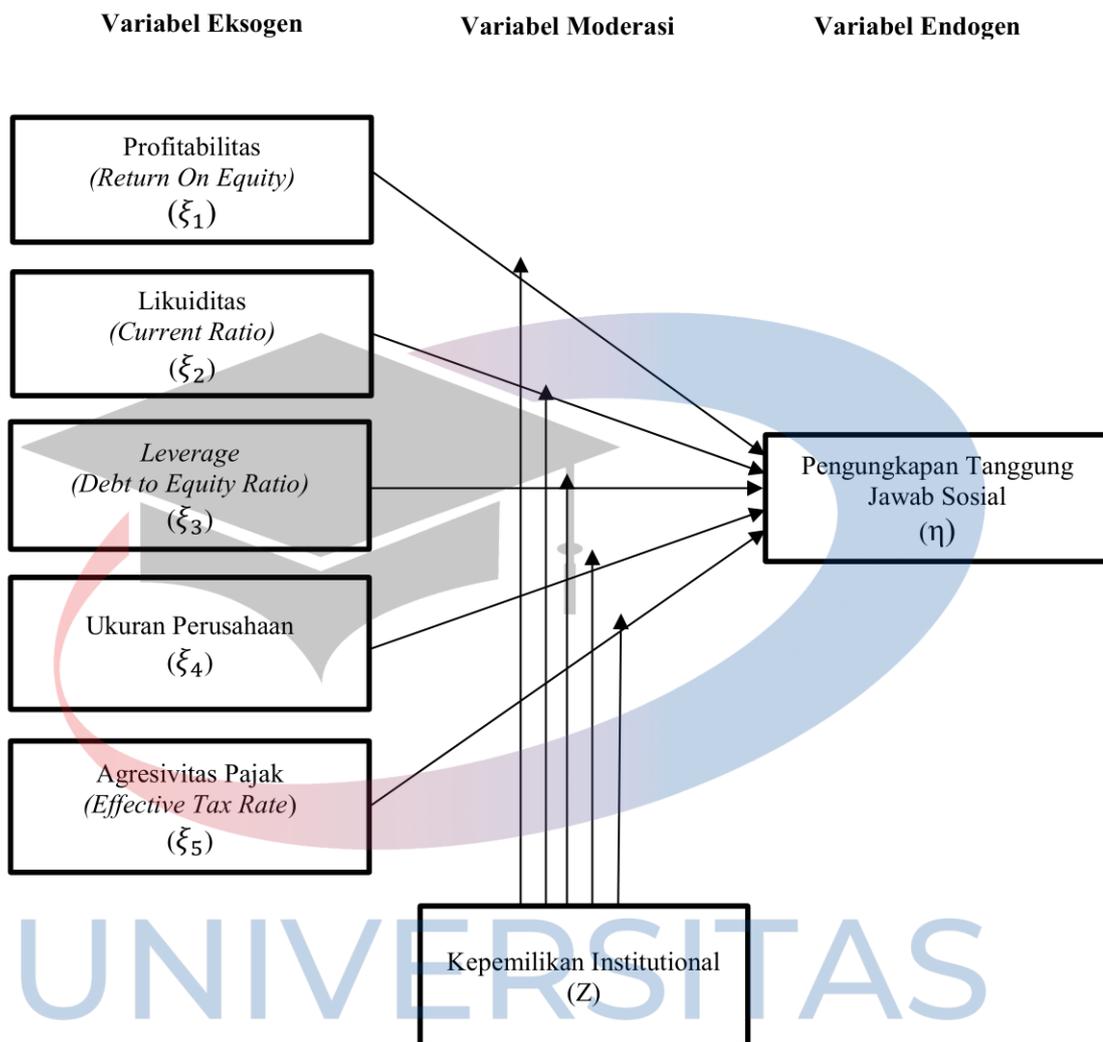
Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang di peroleh
Patrisia Adiputri Singal dan I Nym Wijana Asmara Putra (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing.</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i> 2. Kepemilikan Asing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i></p>
Ni Putu Tista Paradiva Yani dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2020)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan <i>Leverage</i> Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<p><u>Variabel Dependen :</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan <i>Leverage</i>.</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.</p> <p><u>Secara Parsial :</u> 1. Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p>
Ni Wayan Ristiari Jananti dan Putu Ery Setiawan (2018)	Pengaruh Agresivitas Pajak Pada <i>Corporate Social Responsibility</i> Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Variabel Independen :</u> Agresivitas Pajak</p> <p><u>Variabel Moderasi :</u> Profitabilitas.</p>	<p><u>Secara Simultan :</u> -</p> <p><u>Secara Parsial :</u> Agresivitas Pajak berpengaruh positif pada <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Hasil Moderasi :</u> Profitabilitas mampu</p>

Lanjutan Tabel 2.2

Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang di peroleh
Niki Ratnasari dan Iren meita (2017)	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	<p><u>Variabel Dependen :</u> Pengungkapan tanggung jawab sosial</p> <p><u>Variabel Independen :</u> Karakteristik Perusahaan</p> <p><u>Variabel Moderasi :</u> Kepemilikan Institusional</p>	<p>memoderasi pengaruh agresivitas pajak pada <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Secara Simultan :</u> -</p> <p><u>Secara Parsial :</u> Ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.</p> <p><u>Hasil Moderasi :</u> Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh umur perusahaan dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.</p>

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, variabel endogen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial ( $\eta$ ). Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional ( $Z$ ). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Equity* ( $\xi_1$ ), Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* ( $\xi_2$ ), Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* ( $\xi_3$ ), Ukuran Perusahaan ( $\xi_4$ ), dan Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* ( $\xi_5$ ).

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Ketika nilai profitabilitas perusahaan semakin meningkat hal tersebut akan membuat manajemen perusahaan menjadi lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan, karena ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka manajemen perusahaan akan termotivasi untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan agar dapat menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang semakin besar pula. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Putri, Aditya, & Nurdhiana, 2019).

Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkat ketika kepemilikan institusi dalam perusahaan mampu mendorong perusahaan agar beroperasi lebih baik dan menghasilkan laba, sebab bagi investor institusi yang aktif pastinya akan sangat memperhatikan kondisi laba di perusahaan tempatnya berinvestasi, dengan laba yang ada perusahaan mampu melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya di dalam laporan keuangan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, investor, maupun pemerintah sehingga citra perusahaan akan semakin baik ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1a</sub> : Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

H<sub>2a</sub> : Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Profitabilitas dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

#### 2.4.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas pada penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. *Current ratio* adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya serta menjadi tolak ukur bagi investor dalam menilai perusahaan. *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan tidak terjadi masalah likuiditas. Suatu perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang tinggi sehingga mampu membayar kewajiban lancarnya, hal ini akan semakin baik bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan kegiatan operasional dengan aset lancarnya dan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Purba & Candradewi, 2019)

Hubungan likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkat apabila kepemilikan institusional mampu berperan aktif terhadap kinerja keuangan termasuk tingkat likuiditas yang terdapat didalamnya. Tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mampu meningkatkan rasio likuiditas perusahaan, sebab kemampuan menjamin kewajiban jangka pendek akan dapat dipenuhi dengan dana dari institusi. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga akan semakin meningkat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1b</sub>: Likuiditas berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

H<sub>2b</sub>: Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Likuiditas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

### 2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

*Leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan suatu alat yang digunakan sebagai ukuran seberapa besar kemungkinan perusahaan mempunyai tingkat risiko utang tak tertagihnya pada kreditur yang nantinya akan digunakan dalam membiayai asset perusahaan. Adanya pengaruh *leverage* yang tinggi maka semakin meningkat pula kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran utang, maka manajer akan melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang akan datang, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan tanggung jawab sosial agar dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Purba & Candradewi, 2019).

Hubungan *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkat apabila proporsi kepemilikan lebih besar, karena proporsi kepemilikan saham besar (lebih dari 5%) maka tindakannya akan berpengaruh terhadap tingkat *leverage* atau disebut kebijakan utang yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin produktif, begitupun suatu institusi yang memiliki tingkat kepemilikan besar akan mengawasi lebih jauh terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, termasuk *leverage* didalamnya. Hal tersebut akan mendorong jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1c</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

H<sub>2c</sub>: Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab sosial.

### 2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-

rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan diperhatikan dan lebih disoroti oleh masyarakat serta memiliki tekanan politis agar lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial atas aktivitas usahanya terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka informasi yang terkait pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin meningkat. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Purba & Candradewi, 2019).

Hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkat apabila kepemilikan institusional mampu mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, untuk menciptakan perusahaan berskala besar. Perusahaan dengan skala besar tentunya lebih disoroti dan berupaya menjaga citra nya ditengah-tengah masyarakat, selain itu perusahaan berskala besar juga memiliki biaya keagenan yang besar sehingga perusahaan dengan skala yang besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dengan tujuan mengurangi biaya keagenan tersebut sehingga dapat memperkuat ukuran perusahaan yang dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1d</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

H<sub>2d</sub>: Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab sosial.

#### **2.4.5 Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi**

Agresivitas pajak pada penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkat karena perusahaan akan berusaha mempertahankan citra baiknya dan mengurangi pandangan negatif dari masyarakat yang ditimbulkan dari tindakan agresivitas pajak dengan melakukan lebih banyak pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mencari

perhatian dan legitimasi positif dari publik. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Setiawan & Jananti, 2018).

Hubungan agresivitas pajak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial meningkat apabila kepemilikan institusional mampu berperan memberikan pengawasan dan pengendalian untuk menekan perilaku oportunistik manajemen yang akan menyebabkan meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan memperkuat agresivitas pajak sehingga menciptakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak dengan tujuan untuk mempertahankan citra baiknya dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat agresivitasnya rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1e</sub>: Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

H<sub>2e</sub>: Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab sosial.

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL